

ABSTRAK

Nur Indah Permanasari (01656210079)

Tuntutan Ganti Rugi Korban Pengadaan Tanah pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/PDT/2022)

(+137 halaman: 1 tabel; 1 lampiran)

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pada dewasa ini semakin meningkat seiring dan sejalan dengan kemajuan dan dinamisasi masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Kewenangan Pemerintah untuk melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum didasarkan pada asas bahwa semua hak atas tanah berfungsi sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka pengadaan tanah bagi kepentingan umum khususnya bagi jalan tol sangat dimungkinkan oleh negara. Di dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut perlu adanya ganti kerugian dan menjadi unsur terpenting. Ganti kerugian tidak bisa dilakukan oleh semena-mena. Namun tetap harus mencerminkan adanya kepastian hukum sehingga terdapat kejelasan prosedur terkait dasar pembayaran ganti kerugian dalam proses pengadaan tanah. Artikel ini menemukan bahwa sudah adanya ketentuan penetapan proses pengadaan tanah dan proses ganti kerugian yang harus dilakukan oleh berbagai pihak. Artikel ini merupakan penelitian penulis dalam memenuhi syarat penulisan tesis yang berjudul Tuntutan Ganti Rugi Korban Pengadaan Tanah pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/PDT/2022).

Kata Kunci: pengadaan tanah; kepentingan umum; ganti kerugian.

Referensi: 59 buku (1975-2022)

ABSTRACT

Nur Indah Permanasari (01656210079)

Claims for Compensation for Victims of Land Acquisition in the Serang-Panimbang Toll Road Development Project (Case Study of Supreme Court Decision Number 160 K/PDT/2022)

(+137 pages: 1 table; 1 attachment)

*Land acquisition for the implementation of development in the public interest is currently increasing along with and in line with the progress and dynamics of society, both in urban and rural areas. The government's authority to conduct land acquisition for public purposes is based on the principle that all land rights have a social function. Based on this, land acquisition for the public interest, especially for toll roads, is made possible by the state. In the implementation of land acquisition, it is necessary to have compensation and is the most important element. Compensation cannot be done arbitrarily. However, it still must reflect legal certainty so that there is clarity on procedures related to the basis for payment of compensation in the land acquisition process. This paper finds that there are already provisions for establishing a land acquisition process and a compensation process that must be carried out by various parties. This article is the author's research in fulfilling the requirements for writing a thesis entitled *Claims for Compensation for Victims of Land Acquisition in the Serang-Panimbang Toll Road Development Project (Case Study of Supreme Court Decision Number 160 K/PDT/2022)*.*

Keywords: *land acquisition; public interest; compensation.*

Reference: 59 (1975-2022)